

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, serta merupakan kehendak seluruh bangsa dengan Pancasila sebagai dasarnya. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dengan tantangan utamanya adalah memperbaiki kehidupan.

Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan pembangunan. Perkembangan dan pembangunan sering diikuti oleh timbulnya berbagai masalah dari berbagai elemen kota dan karakteristiknya masing-masing saling keterkaitan sehingga penyelesaian masalah harus dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah, menuntut adanya pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan manusia dengan memperhatikan faktor-faktor alamiah berupa keadaan iklim, relief, luas wilayah, sumberdaya alam atau tanah yang subur. Pada dasarnya, masalah pengembangan wilayah ditandai dengan perbedaan fenomena antara lain dalam hal pertumbuhan penduduk, struktur pekerjaan, pendidikan, transportasi, jumlah bangunan, dan fasilitas kota yang bertambah dan juga disertai dengan terjalannya ruang dengan kehidupan bersama sebagai akibat yang nampak pada perubahan sosial ekonomi dan sosial budaya.

Daldjoeni (1992) mengemukakan bahwa aspek-aspek geografi yang mempengaruhi perkembangan suatu daerah terdiri dari lokasi, iklim, jenis tanah, jenis flora dan fauna, kondisi air, sumber mineral serta kontak daerah itu terhadap lautan juga sangat berpengaruh kepada perkembangan kota. Keadaan geografis dan kemampuan penduduk untuk merubah suatu wilayah dan sesuai dengan keinginannya mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi kondisi fisik geografis yang berbeda pula pada kondisi sosial setempat.

Faktor yang menentukan perkembangan suatu daerah tergantung kepada kondisi fisik dan kondisi sosial yang ada di daerah tersebut. Kondisi fisik tersebut meliputi (letak, jarak, luas lahan, keadaan air tanah, tanah, sumber air dan flora fauna sedangkan kondisi sosial meliputi sumberdaya manusia (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian, pendidikan dan kesehatan), dan juga tersedianya sarana/ fasilitas memadai yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, poliklinik), fasilitas perekonomian (pasar, pertokoan), fasilitas umum (listrik, air bersih, bank, pos) dan aksesibilitas (panjang jalan dan indeks jalan).

Selaras dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengarahkan agar pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa guna mempercepat laju pertumbuhan pembangunan serta

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat daerah, seiring bergulirnya reformasi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang pemerintahan dan politik, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang keleluasaan pada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya dalam bentuk pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru.

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2003. Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 dalam Pasal 2, yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki luas 251.765,93 Ha dan berbatasan dengan empat Kabupaten yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan tidak hanya menjadi Pusat Pemerintahan, tetapi menjadi pusat pengendalian dan perkembangan pembangunan, dan juga menjadi pusat jasa

perdagangan dan jasa sosial lainnya yang diharapkan mendorong terwujudnya keseimbangan antar wilayah di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, telah berkembang dengan pesat dan menjadi pusat aktivitas dari masyarakat. Perkembangan ini ditandai dengan semakin pesatnya pembangunan fasilitas sosial dari tahun ke tahun yang menyangkut pembangunan fasilitas pemerintahan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perbankan, perumahan, dan juga sarana pendukung aktivitas masyarakat seperti jalan, jaringan listrik dan pusat perbelanjaan/pasar.

Melihat pesatnya pelaksanaan pembangunan setelah terbentuknya Kabupaten Humbang Hasundutan, berhadapan dengan masalah akan kebutuhan sumberdaya dan ruang/lahan, sebab pada dasarnya pembangunan fisik memerlukan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang tersedia. Perkembangan pembangunan ini didasarkan pada pengembangan wilayah yang dilakukan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, sehingga memerlukan perubahan pembangunan fasilitas sosial yang memadai bagi masyarakat. Tersedianya fasilitas sosial ini merupakan pendukung utama dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perkembangan fasilitas sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2002- 2010.

B. Identifikasi Masalah

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan seperti Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2003 Humbang Hasundutan resmi menjadi

sebuah Kabupaten dengan Dolok Sanggul sebagai Ibukota Kabupaten. Pengembangan wilayah Kabupaten sebagai Kabupaten hasil pemekaran ini membawa perubahan yang secara langsung memicu timbulnya dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dari pengembangan wilayah tersebut timbul beberapa masalah yaitu (1) Jumlah Penduduk yang semakin bertambah akibat faktor kelahiran maupun migrasi masuk serta adanya urbanisasi; (2) Dengan bertambahnya penduduk akan menimbulkan masalah yaitu fasilitas yang dibutuhkan akan bertambah sehingga tata ruang kota akan mengalami perubahan; (3) Terjadinya perubahan aktivitas ekonomi penduduk yang dulunya bersifat agraris setelah menjadi sebuah Kabupaten berubah menjadi nonagraris, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan fasilitas sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri atas fasilitas pendidikan, kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, pustu, apotek, toko obat), fasilitas perekonomian (pasar, pertokoan, bank), fasilitas umum (listrik, air bersih, bank, pos), penginapan/ hotel dan aksesibilitas (panjang jalan dan indeks jalan).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah perkembangan fasilitas sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2002 - 2010, yang meliputi fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, pustu, apotek, toko obat, dan rumah bersalin), pendidikan, perumahan, fasilitas penyediaan air bersih, bank, jalan, jaringan listrik dan fasilitas pasar/pusat perbelanjaan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan fasilitas sosial dalam pengembangan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2002 – 2010.
2. Bagaimana analisis ketersediaan dan kesesuaian fasilitas sosial dalam pengembangan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2002 – 2010.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan fasilitas sosial dalam pengembangan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2002 -2010
2. Untuk menganalisis ketersediaan dan kesesuaian fasilitas sosial dalam pengembangan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2002 -2010

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan di bidang perkembangan pembangunan fasilitas sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Sebagai sumber informasi bagi Pemerintah setempat dalam upaya perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran, bahan studi atau tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan Geografi.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai perkembangan fasilitas sosial suatu daerah pada waktu dan tempat yang berbeda.